

KINERJA PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BAREGBEG KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS

Istiqomah Nurisa Mirzasari

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia
E-mail: istiqomahnurisa18@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kinerja pengelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum optimal. Adapun belum efektifnya pengelolaan dalam pelaksanaan program-program BUMDes yang ada di Desa Baregbeg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja pengelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan namun belum optimal. Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu pendapatan BUMDes Desa Baregbeg yang tidak berkembang atau jalan ditempat juga ada beberapa program kerja BUMDes yang tidak berjalan serta pengelola yang belum bisa melakukan pengadministrasian berbasis IT. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan untuk meningkatkan kinerja yaitu melakukan pencarian modal/dana untuk mengembangkan usaha BUMDes juga pengelolaan yang lebih baik dalam mengelola BUMDes agar bisa berjalan dengan baik, perlunya pelatihan atau pengembangan kapasitas mengenai pengoperasian komputer/laptop yang berhubungan dengan IT bagi pengelola BUMDes Desa Baregbeg.

Kata Kunci: Kinerja, Pengelola, BUMDes.

PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah, pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan instrument penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah melalui reformasi birokrasi. Tujuan akhir dari reformasi birokrasi dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah terwujudnya

pelayanan publik yang prima (cepat, tepat, murah, transparan, dan akuntabel) dan peningkatan kinerja birokrasi yang semakin baik. Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktor yang menjadi kriteria untuk mencapai kelancaran tujuan suatu organisasi atau instansi adalah mengidentifikasi dan mengukur kinerja

pegawainya. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja pegawai mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. Setiap pekerjaan memiliki kriteria pekerjaan yang spesifik, atau dimensi kerja yang mengidentifikasi elemen-elemen yang paling penting dari suatu pekerjaan (Muhammad Nur Alim, 2019).

Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Bahkan apabila kita ingin menilai suatu bangsa itu sejahtera atau tidak dapat dilihat dari kemajuan sebuah Desa, tidak hanya itu saja harus adanya dorongan yang terus menerus bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini menjadi awal dari sebuah Desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Harapannya pemerintahan Desa dapat membangun

perekonomian masyarakat Desa menuju desa yang mandiri. Desa mandiri saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan secara lebih serius serta didiskusikan lebih mendalam. Pasalnya, sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, kebijakan utama yang dibawa adalah diberikannya alokasi dana Desa. Saat ini pembangunan desa melalui BUMDes menjadi salah satu cara konstruktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Desa harus mampu mengoptimalkan dan menggali seluruh potensi yang ada di desanya. Hal ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa demi meningkatkan kas desa. Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan adalah melalui pertumbuhan lembaga mikro Desa, dan salah satu lembaga mikro di wilayah pedesaan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Peningkatan suatu perekonomian melalui bumdes sangat ditentukan oleh kinerja pegawai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, hal tersebut sejalan menurut Anggraeni (2016) bahwa keberadaan BUMDes membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung. Hal ini sejalan dengan yang terjadi di desa Baregbeg, dimana desa baregbeg

memiliki BUMDes yang di dirikan pada tanggal 31 Desember 2016 menurut peraturan pemerintah Desa Baregbeg Nomor 6 Tahun 2021 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yang bernama Buni Geulis ini sebagai bentukan dari desa Baregbeg itu sendiri. Dalam memproteksi permasalahan-permasalahan yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah membuat peraturan-peraturan sebagai pedoman pengelolaan BUMDES dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2013 tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Tujuan dari peraturan tersebut guna mengetahui bagaimana tata cara mulai dari pembentukan sampai ke pengelolaan BUMDES. Dengan adanya BUMDes Buni Geulis ini diharapkan dapat berperan bagi masyarakat desa baregbeg sesuai dengan misi Bupati Ciamis yaitu penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa (/setda.ciamiskab.go.id).

Peneliti menemukan bahwa kinerja pengelola badan usaha milik desa Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya keterampilan dalam bidang usaha dan pengadministrasian berbasis IT. Hal tersebut terlihat dari kurangnya ilmu

dan wawasan dalam meningkatkan kualitas dan mengakibatkan terhambatnya pengelolaan BUMDes.

2. Belum optimalnya sumber daya manusia dalam pengelolaan badan usaha milik desa, hal tersebut terlihat dari adanya tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan BUMDes dan berdampak pada kurang berjalannya BUMDes desa baregbeg.

3. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan pengelola BUMDes, hal tersebut terlihat dari ketidaktepatan waktu pengelola dalam menyelesaikan pekerjaan yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat kinerja karyawan/pengelola BUMDes.

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Kinerja Sebagai Pengelola Badan Usaha Milik Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dan diterjemahkan oleh Hadari Nawawi (2006: 63) mengatakan bahwa 'Kinerja adalah (a) sesuatu yang dicapai, (b) prestasi yang diperlihatkan, (c) kemampuan kerja'. Definisi lain mengenai kinerja menurut Hadari Nawawi (2006: 63) adalah "Kinerja dikatakan tinggi apabila suatu target kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampaui batas waktu yang disediakan".

Sedarmayanti (2007) mengatakan bahwa kinerja karyawan merupakan hasil kerja karyawan, yakni sebuah

proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan yang hasil kerjanya tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara kongkrit dan dapat diukur. Sedangkan menurut Mangkunegara (2009) kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitatif dan kuantitatif yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Untuk mengetahui seorang karyawan mempunyai kinerja yang baik atau tidak dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian kerja terhadap karyawan tersebut. Menurut Tohardi (2002) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah pendidikan, ketrampilan, disiplin kerja, budaya, etika kerja, manajemen, tingkat penghasilan, kesempatan berprestasi, beban pekerjaan, lingkungan kerja dan teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, menurut Mangkunegara (2009) yaitu :

1. Faktor Kemampuan

Kemampuan IQ dan skill artinya karyawan yang memiliki IQ yang tinggi dan pendidikan yang memadai untuk jabatannya serta terampil dalam mengerjakan tugasnya sehari-hari maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan.

2. Faktor Motivasi

Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan perusahaan. Motivasi terbentuk dari

sikap seorang karyawan dalam menghadapi situasi kerja.

3. Sikap Mental

Kondisi mental dari dalam diri karyawan untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal.

Menurut Mahsun, (2006: 25) penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat krusial karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja mampu dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Kinerja selalu berkaitan dengan ukuran atau standar kerja yang terkait dengan parameter-parameter tertentu atau dimensi yang dijadikan dasar atau acuan oleh organisasi untuk mengukur kinerja. Pengukuran kinerja karyawan sangat penting dilakukan. Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui apakah karyawan mampu menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau apakah karyawan menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan atau apakah hasil kinerja yang telah dicapai karyawan sesuai dengan yang diharapkan. Suatu pekerjaan dapat diukur melalui kuantitas dan kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran dan kemampuan kerja sama (Wibowo, 2007).

Sebagai kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pengelolaan sumber daya manusia menjadi prioritas pemerintah.

UU No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN dijalankan berdasarkan asas Profesionalisme, Proporsional, Akuntabel, serta Efektif dan Efisien agar peningkatan kinerja birokrasi dapat tercapai. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah:

1. Profesionalisme
2. Proporsional
3. Akuntabel
4. Efektif dan Efisien

Armstrong dan Baron (1998: 275) membagi tipe ukuran kinerja berdasarkan pada lingkup penggunaannya. Dalam lingkup individual ukuran kinerja bagi individu berhubungan dengan akuntabilitas dan ditetapkan dalam kriteria kuantitas, kualitas, produktivitas, ketepatan waktu, dan efektivitas biaya. Dengan demikian, ukuran kinerja individual sangat bervariasi menurut pekerjaan dan tanggung jawabnya. Ukuran kinerja untuk seseorang dapat dinyatakan dalam bentuk berikut ini:

1. Kuantitas, dinyatakan dalam bentuk jumlah output, atau persentase antara output aktual dengan output yang menjadi target.
2. Kualitas, dinyatakan dalam bentuk pengawasan kualitas yang bervariasi di luar batas, jumlah keluhan yang masih dalam batas yang dapat dipertimbangkan untuk ditoleransi.
3. Produktivitas, diukur sebagai output per pekerja.
4. Ketepatan waktu, dinyatakan dalam bentuk pencapaian batas waktu

pengiriman, jumlah unit yang dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Pengawasan biaya, sebagai biaya per unit produksi, variasi upah buruh langsung/tidak langsung.

Menurut Balderton, mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Moekijat mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Dalam pengelolaan terdapat fungsi-fungsi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Tinjauan Badan Usaha Milik Desa

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:4) mendefinisikan bahwa "Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”. Kemudian, menurut Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa :

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dibentuknya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa adalah salah satu bentuk peran pemerintah sebagai kekuatan untuk membantu terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui penciptaan produktivitas ekonomi bagi desa. BUMDes Menurut (Maryunani, 2008) :

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara etimologi berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang diartikan kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang

bertujuan mencari laba atau keuntungan sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan sementara Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (KBBI).

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2010, menerangkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya adanya potensi desa diimbangi dengan adanya potensi sumberdaya manusia yang kompetitif tidak cukup untuk menanggulangi perekonomian tanpa adanya pihak ketiga yaitu paratur pemerintah desa. Karena naungan yang kuat dari pemerintah desa dapat menciptakan desa yang maju, berdikasi, dan makmur.

Berdasarkan Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:5) menyebutkan empat tujuan utama pendirian BUMDesa adalah :

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan;

Tujuan BUMDes yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan berkeadilan. Fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014).

BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki fungsi sebagai penyedia pelayanan sosial, sedangkan fungsi BUMDes sebagai lembaga komersial memiliki tujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal berupa barang dan jasa ke pasar. Selain itu BUMDes juga memiliki fungsi sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian desa untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa, dan sebagai sarana untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (Wikipedia)

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, fungsi Bumdes yaitu:

1. Sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau

dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa.

2. Sebagai lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
3. Sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang merupakan suatu metode menggambarkan segala kegiatan untuk memecahkan masalah, menganalisis kejadian secara sosial yang sedang diteliti oleh peneliti, dilakukan dengan cara observasi mencari informasi, mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis kemudian dianalisis untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Menurut Nazir (1988: 63), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi. Dengan menggunakan metode kualitatif ini, realitas atau fenomena mengenai kebermaknaan hidup pada penyandang disabilitas fisik yang berwirausaha akan dipandang sebagai suatu hasil konstruksi pemikiran yang dinamis dan penuh makna (Poerwandari, 2005).

Hal tersebut sesuai dengan teori dari Sugiyono (2013) yang menyebutkan bahwa “Realitas dalam metode penelitian kualitatif merupakan konstruksi dari pemahaman terhadap semua data dan maknanya”. Kirk dan Miller (dalam Moloeng, 2002: 3) mendefinisikan “Penelitian kualitatif sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan data yang dialinya”.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ciamis dengan objek penelitian ini yaitu Desa Baregebeg Kecamatan Baregebeg Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan teori mengukur kinerja menurut Armstrong dan Baron (1998: 275) yang menjelaskan lima indikator yaitu kuantitas, kualitas, produktifitas, ketepatan waktu dan pengawasan biaya.

Arikunto (2002:96) mengemukakan bahwa “Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah

hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan”. Dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pokok yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan informan, dan data sekunder merupakan data yang berperan sebagai data pendukung bagi data pokok yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, data dari BUMDes Desa Baregebeg dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun yang termasuk data dalam penelitian ini adalah meliputi:

1. Hasil Wawancara
2. Pengambilan Gambar atau Foto (Dokumentasi)
3. Data dari Dokumen BUMDes Desa Baregebeg

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam observasi secara langsung ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi didalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer. Observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai kinerja pengelola BUMDes Desa Baregebeg. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah *in-depth interview* yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden

atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Wawancara akan dilaksanakan secara offline.

Aktivasi dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016: 247) mengemukakan sebagai berikut :

1. *Data Reduction* / Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. *Data Display* / Penyajian Data
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.
3. *Conclusion Drawing* / *Verification*
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai kinerja pengelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dimana penelitian ini akan dijelaskan dengan menggunakan teori mengukur kinerja dinas menurut

Armstrong dan Baron (1998: 275) yang menjelaskan lima indikator yaitu kuantitas, kualitas, produktifitas, ketepatan waktu dan pengawasan biaya:

Kuantitas

Adanya kesuaian jumlah hasil kerja dengan rencana program yang telah ditetapkan merupakan suatu usaha untuk mengetahui kinerja pengelola BUMDes. Dalam hal ini terdapat hambatan yang menjadikan BUMDes belum dikatakan optimal. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa rencana program yang di tetapkan oleh BUMDes Desa Baregbeg berupa :

1. Menambah modal usaha;
2. Relokasi bidang usaha ke tempat yang lebih strategis;
3. Menjalin kemitraan usaha dengan lembaga/organisasi yang ada di desa;
4. Memperluas jaringan pemasaran;
5. Bermitra dengan distributor;
6. Melakukan study kelayakan untuk usaha baru;
7. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia.
8. Memperkokoh management kepengurusan
9. Melaksanakan digitalisasi management serta laporan usaha
10. Melakukan kajian berbagai jenis usaha

Dari 10 program di atas tersebut, terdapat 3 program yang sudah terealisasikan yaitu memperkokoh management kepengurusan dibuktikan dengan adanya restrukturisasi organisasi yang sudah dilakukan

mengenal kepengurusan yang lama tidak berjalan. Relokasi bidang usaha ke tempat yang lebih strategis dibuktikan dengan pemindahan bidang usaha air minum isi ulang ke tempat yang lebih bisa dijangkau oleh masyarakat luas yang lokasinya berada di pinggir jalan. Menjalinkan kemitraan usaha dengan lembaga/organisasi yang ada di desa yaitu dibuktikan dengan dibuatnya cagar budaya selamanik.

Diketahui bahwa target BUMDes Desa Baregbeg pada tahun 2021 sebesar Rp. 9.000.000 yang berasal dari unit usaha sarana air bersih sedangkan untuk target pendapatan pada tahun 2022 adalah Rp.12.000.000 dengan penambahan pipanisasi.

Tabel 1. Data ketercapaian target 2021 dan 2022

No	Jenis Usaha	Target Pendapatan		Realisasi	
		2021	2022	2021	2022
1.	Unit Usaha Dagang dan Jasa (BUMDes Mart)	-	-	-	-
2.	Unit Usaha Sarana Air Bersih	Rp. 9.juta	Rp. 12.juta	Rp. 9.juta-	
3.	Unit Usaha Desa Wisata	-	-	-	-
4.	Unit Usaha Kerajinan & UMKM	-	-	-	-

Tabel ini menunjukkan bahwa program-program pada tahun 2021 tidak semua berjalan hanya unit usaha sarana air bersih saja yang berjalan sesuai dengan target tahun 2021, dan target pendapatan tahun 2022 masih dalam proses pelaksanaan dengan

penambahan pipanisasi sarana air bersih di pasanggrahan. Adapun dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2022 masih dalam proses pengerjaannya seperti unit usaha desa wisata yang sedang melakukan study kelayakan cagar budaya selamanik.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini yaitu dengan mencari modal untuk mengembangkan usaha BUMDes dan juga pengelolaan yang lebih baik dalam mengelola BUMDes agar bisa berjalan dengan baik, ataupun modal usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap BUMDes untuk mengembangkan usahanya.

Kualitas

Salah satu langkah untuk mengetahui kinerja pengelola Badan Usaha Milik Desa Di Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, adalah dengan Adanya pengawasan untuk memenuhi standar hasil kerja. Adapun pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh badan pengawas yaitu dengan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh badan pengawas dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat aktivitas kerja pengelola BUMDes, sedangkan pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan membuat laporan bulanan dan tahunan.

Setelah dilakukan identifikasi mengenai adanya pengawasan untuk memenuhi standar hasil kerja, langkah selanjutnya adalah mengetahui sarana

untuk pengaduan keluhan atas program BUMDes. Pengaduan keluhan-keluhan dari masyarakat maupun pengelola BUMDes Desa Baregbeg atas program-program BUMDes dilakukan dengan cara berkomunikasi melalui online (whatsapp) maupun secara langsung melalui individu (pengelola) yang nantinya akan di musyawarahkan dalam pertemuan rapat pengelola BUMDes. Selain itu sampai saat ini belum tersedia kotak saran yang khusus disediakan oleh BUMDes. Tetapi yang terlihat hanya ada kotak saran yang ada di kantor pemerintah Desa Baregbeg.

Produktifitas

Produktifitas dalam kinerja pengelola dapat dilihat dari Kemampuan pengelola untuk mencapai tujuan dari BUMDes, terbukti masih adanya pengelola yang belum bisa melakukan pengadministrasian berbasis IT sehingga terjadinya tumpang tindih pekerjaan. sebagaimana dalam visi BUMDes Baregbeg yaitu “mewujudkan kesejahteraan masyarakat Baregbeg melalui usaha pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan berkualitas” terlihat belum dilaksanakan secara optimal karena masih ada beberapa pengelola yang kurang dalam bidang IT walaupun sebagian besar latar pendidikan pengelola Sarjana tetapi tidak semua mempunyai *basic* IT atau pengadministrasian yang cukup baik. Maka dari itu pengelola BUMDes perlu melakukan pelatihan atau pengembangan kapasitas mengenai

pengoprasian komputer/laptop yang berhubungan dengan IT.

Selanjutnya melakukan penelitian kinerja pengelola pada indikator kemampuan pengelola dalam menggali potensi usaha BUMDes yang belum optimal, hal tersebut terlihat dari belum adanya kemitraan usaha dengan lembaga/organisasi di desa yang bisa membantu dalam menggali potensi usaha BUMDes serta adanya keterbatasan dana/modal dalam merealisasikan program-program BUMDes.

Ketepatan Waktu

Salah satu langkah untuk mengetahui kinerja pengelola Badan Usaha Milik Desa Di Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, adalah dengan adanya kemampuan pengelola dalam menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Hal ini terlihat belum optimal dikarenakan pengelola lebih banyak menggunakan waktunya untuk melakukan aktifitas lain seperti pekerjaan menggarap sawah, dan pada saat pelaporan hasil kerja setiap bulannya tidak segera diselesaikan. Adapun dengan upaya yang dilakukan dalam menangani hal ini yaitu dengan memberikan sanksi kepada pengelola agar setiap pengelola BUMDes bisa disiplin dalam melaksanakan pekerjaan.

Setelah dilakukan identifikasi mengenai kemampuan pengelola dalam menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Selanjutnya melakukan identifikasi kinerja pengelola mengenai

pencapaian target program BUMDes yang terlihat belum optimal. Ditunjukkan dengan adanya program kerja BUMDes yang tidak berjalan, tetapi sekarang sasarannya lebih kepada desa wisata yang masih dalam tahap *study* kelayakan cagar budaya Selamanik dan relokasi usaha air minum isi ulang yang mulai berjalan.

Pengawasan Biaya

Untuk mengetahui kinerja pengelola BUMDES adalah dengan mengetahui kesesuaian gaji pengelola dengan beban kerja yang digunakan sudah terlihat optimal. Terbukti dari adanya anggaran dasar/ anggaran rumah tangga yang menjadi pedoman bagi BUMDes Desa Baregbeg sehingga gaji pengelola sesuai dengan beban kerja yang telah dikerjakan oleh pengelola BUMDes Desa Baregbeg. Selanjutnya langkah yang dilakukan untuk mengetahui pengawasan biaya yang diberikan adalah kesesuaian akomodasi usaha dengan jenis usaha yang dijalankan. Hal ini terlihat baik dengan adanya sarana air bersih yang pipanya masih kurang untuk bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh lagi, berbeda dengan relokasi usaha air minum isi ulang yang sudah berjalan di tempat yang lebih bisa terjangkau oleh masyarakat banyak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja pengelola Badan Usaha

Milik Desa di Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis memiliki 10 rencana program yang sudah ditetapkan. Tetapi dari 10 program tersebut hanya 3 program yang sudah terealisasi salah satunya yaitu memperkuat management kepengurusan dibuktikan dengan adanya restrukturisasi organisasi yang sudah dilakukan mengenai kepengurusan yang lama tidak berjalan. Adapun dengan target BUMDes Desa Baregbeg pada tahun 2021 terbilang Rp. 9.000.000 yang berasal dari unit usaha sarana air bersih sedangkan untuk target pendapatan pada tahun 2022 adalah Rp. 12.000.000 dengan penambahan pipanisasi.

Adanya pengawasan untuk memenuhi standar hasil kerja dilakukan secara rutin oleh badan pengawas yaitu dengan secara langsung maupun tidak langsung. Langkah selanjutnya adalah mengetahui sarana untuk pengaduan keluhan atas program BUMDes. Terdapat pengaduan keluhan-keluhan dari masyarakat maupun pengelola BUMDes Desa Baregbeg atas program-program BUMDes, hal tersebut dilakukan dengan cara berkomunikasi melalui online (whatsapp) maupun secara langsung melalui individu (pengelola) yang nantinya akan dimusyawarahkan dalam pertemuan rapat pengelola BUMDes.

Produktifitas dalam kinerja pengelola dapat dilihat dari Kemampuan pengelola untuk mencapai tujuan dari BUMDes, terbukti masih adanya pengelola yang belum bisa

melakukan pengadministrasian berbasis IT sehingga terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Selanjutnya melihat kemampuan pengelola dalam menggali potensi usaha BUMDes, hal tersebut terlihat dari belum adanya kemitraan usaha dengan lembaga/organisasi di desa yang bisa membantu dalam menggali potensi usaha BUMDes serta adanya keterbatasan dana/modal dalam merealisasikan program-program BUMDes.

Langkah selanjutnya, adanya kemampuan pengelola dalam menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu yang belum optimal, hal ini pengelola lebih banyak menggunakan waktunya untuk melakukan aktifitas lain seperti pekerjaan menggarap sawah, dan pada saat pelaporan hasil kerja setiap bulannya tidak segera diselesaikan.

Tahap terakhir, adanya kesesuaian gaji pengelola dengan beban kerja yang digunakan sudah terlihat optimal. Terbukti dari adanya anggaran dasar/ anggaran rumah tangga yang menjadi pedoman bagi BUMDes Desa Baregbeg sehingga gaji pengelola sesuai dengan beban kerja yang telah dikerjakan oleh pengelola BUMDes Desa Baregbeg.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku*

Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Garis, R. R., Sihab, A. A., & Tiarani, W. A. (2020). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Oleh BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Musamus Journal of Public Administration*, 3(1), 1-9.

Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008)

Moleong, L. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Redyansah, R., Vestikowati, E., & Garis, R. R. (2022). *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran*.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju

Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis

Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan

dan Pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa
Peraturan Desa Baregbeg Nomor 6
Tahun 2021 Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes)

Sumber Lainnya

Nurhayati, C. (Ed.). (2018). *BUMDes dan kesejahteraan masyarakat desa*. Pusat Penelitian, Badan Keahlian, DPR RI, Bidang Kesejahteraan Sosial.

Putra, A. S., & Hendriani, S. (2020). Pengaruh Pelatihan dan

Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan yang Dimediasi oleh Komitmen pada Pengelola Bumdes di Kabupaten Kuansing. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 31(2), 91-99.

Setiawan, D. (2021). BUMDes Untuk Desa: Kinerja BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian di Yogyakarta. *Journal of Social and Policy Issues*, 11-16.